

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asikin, Zainak & Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta..
- Barnawi, Arifin M, 2012, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Biro Hukum Setda DIY, 1977/1978, *Himpunan Peraturan Tentang Kewenangan dan Produk Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- Easton, David, 1953, *The Political System*, John Wiley and Sons, London.
- Effendi, Bachtiar, 1983, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumi, Bandung.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2009, *Menggugat Keistimewaan Yogyakarta : Tarik Ulur Kepentingan Konflik, Konflik Elite dan Perpecahan*, Pinus Publisher, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M, 1988, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indoneisa*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agaria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hasan, M. Iqbal, 2002, *Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hermawan, Ari, 2013, *Ketidakadilan Dalam Norma dan Praktek Mogok Kerja di Indonesia*, Udayana Uniersity Press, Denpasar.
- HR, Ridwan, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2013, *Daerah Istimewa Yogyakarta : Dalam Perdebatan Konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia*, Nusa Medisa, Bandung.
- Lijan, Sinambela Poltak, 2013, *Reformasi Pelayanan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Musyariief, 2013, *Menjamin Kepastian Hukum Atas Tanah Kasultanan*, Ombak CV, Yogyakarta.

Narimawati, Umi, 2008, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*, Agung Media, Bandung.

Nazir, Mohammad, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nugroho, Riant, 2009, *Public Policy*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Purwanto, Budiman Adi & Djoko Prakoso, 1985, *“Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rosari, Aloysius Sony, 2010, *Monarki Yogya Inkonsitusional*, Kompas, Jakarta.

Saiman, 2020, *Manajemen Sekretaris*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Santoro, Urip & Harsono Boedi, 2012, selanjutnya disebut Urip Santoso II, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Santoro, Urip I, 2006, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Santoso, Urip, 2006, selanjutnya disebut Urip Santoso I, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Shidarta, 2004, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks KeIndonesian*, CV Utomo, Bandung.

Soedarisma, dkk, 1984, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.

Soerjono, Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Peresada, Jakarta.

Subarsono, AG, 2006, *Analisis Kebijakan Publik*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta.

Sumaedjono, Maria SW, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.

Sumanto, Hadi Rumsari dan Lukas Dwiantara, 2009, *Manajemen Logistik Pedoman Praktis Bagi Sekretaris dan Staf Administrasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suyitno, 2006, *Hak Atas Tanah Kasultanan Yogyakarta*, Land LMPDP PIU Bapenas, Jakarta.

Tangkilisan, S Nogi Hassel, 2003, *Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, strategis dan kasus*, Lukman Offest dan YPAPI, Yogyakarta.

Utrecht, E, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia*, Pustaka Tanta Masa, Surabaya.

Widodo, Joko, 2008, *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan dan Lampiran Negara

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Keistimewaan Yogyakarta, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5533.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan, Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembar Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1984 Nomor 34 Seri D.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Lembar Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembar Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;

C. Skripsi & Tesis

Adhi Wahyudi, 2017, *Perubahan hak Hak Atas Tanah Megersari Keraton Yogyakarta Sebeleum dan Sesudah Disahkannya Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY*, Penulisan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Christoper Bagas Wirawan, 2017, *Kajian Teori Penguasaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Pasca Berlakunya Undang-Undang Keistimewaan dan Perdasis Pertanian*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Vitri Rimawati Hananta Putri, 2016, *Pemberian Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Kasultanan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kesitimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus PT. Ganesha Dwipaya Bhakti Yogyakarta)*, Penulisan Tesis, Fakultas Hukum Universita Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Jurnal

Antoro, Kus Sri, 2015, "Analisis Kritis Subtansi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bidang Pertanahan", (Yogyakarta: BHUMI, 2015).

Wardhani, Lita Tyesta Addy Listiya, Shenita Dwiwansany, 2019, "*Sistem Pertanahan Keraton Yogyakarta Sebagai Daerah Otonomi Khusus*", (Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 2, 2019)

Ismail, Nur Hasan, 2013, *Menempatkan Realitas Pertanahan Lokal Dalam RUU Keistimewaan DIY*, Mimbar Hukum Nomor 43/II/2013.

Kusumoharyono, Umar, 2006, "*Eksistensi Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Yogyakarta Setelah Berlakunya UU No.5/1960*", (Semarang: DIPONOGORO LAW JOURNAL, 2006)

- Lestari, Ratih, 2018, *“Kebijakan Pertanahan Bagi WNI Keturunan Tionghoa Di Yogyakarta: Diskrimasi Atau Diskiminasi Positif”*, (Jakarta: JURNAL HUKUM & PEMBANGUNAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA, 2018)
- Novikasari, Siti Rahma, 2015, *Pelaksanaan Penataan Kawasan Wisata Pantai Nguyahan Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan Aturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Rahmadhan, Vito Ninggar, 2015, *Pemberian Perizinan Penguasaan Tanah Kasultanan Untuk Usaha Pariwisata di Kawasan Pesisir Pantai Sundak Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
- Rahmahsari, Novi Achmadiyah, 2017 *“Implikasi Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Status Hukum Pakualaman Ground di Kabupaten Kulon Progo”* (Yogyakarta: LEXRenaissance, 2017)
- Ratnawati, 2011, *“Antara ‘Otonomi Sukta dan ‘Kepatuhan’ Pada Pusat Di Era Refromasi: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta”*, (Yogyakarta: JURNAL GOVERNANCE VOL. 2, 2011)
- Sukisno, Djoko, 2007, *“Tanah Kasultanan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Adat”*, (Yogyakarta: Mimbar Hukum Edisi Khusus, Universitas Gadjah Mada, 2007)

E. Internet

- DIKPORA Daerah Istimewa Yogyakarta “Sejarah Singkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” diakses pada hari jumat, tanggal 29 November 2019, pukul 17:39 WIB
- Informasi Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, <http://dppka.jogjaprovo.go.id> , diakses pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2020, pukul 20:15 WIB
- Kompas.com, “Hari Ini dalam Sejarah: Kasultanan Yogyakarta Masuk Wilayah NKRI”
<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/05/12472151/hari-ini-dalam-sejarah-kesultanan-yogyakarta-masuk-wilayah-nkri?page=all>, diakses pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020
- Portal Pemerintah Kota Yogyakarta, “Sejarah Kota”
<http://www.jogjakota.go.id/pages/sejarah-kota>, diakses pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, pukul 19:29 WIB
- Yogyakarta, Tempo.co “Komnas HAM: Keraton Yogya Kembalikan Prinsip Raja Kuasai Tanah”

<https://nasional.tempo.co/read/778818/komnas-ham-keraton-yogya-kembali-kan-prinsip-raja-kuasai-tanah/full&view=ok>, diakses pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, pukul 14:27 WIB

Youtube, “Animasi Asal Usul Keistimewaan Yogyakarta”
<https://www.youtube.com/watch?v=4dKzB3MgQhM>, diakses pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2020, pukul 19:43 WIB

Harian Merapi.com “Bidang SG-PAG Dipatok Ulang”
<https://www.harianmerapi.com/yogyakarta/2020/09/03/106854/bidang-sg-pag-dipatok-ulang>, diakses pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2020, pukul 15:40 WIB

TribunJogja.com “Dispetarung DIY Targetkan Pematokan Ulang SG dan PAG selesai 2020”
<https://jogja.tribunnews.com/2020/09/01/dispetarung-diy-targetkan-pematokan-ulang-sg-dan-pag-selesai-2020>, diakses pada hari kamis, tanggal 10 September 2020, pukul 16:10 WIB

Matamatapolitik Berita Politik Dunia “Demi Keistimewaan, Tanah Sultan Harus Dijaga”
<https://www.matamatapolitik.com/demi-keistimewaan-tanah-sultan-harus-dijaga-original-news-polling/>, diakses pada hari Jumat, 18 September 2020, pukul 00:15 WIB